

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PRAKTIK TANGGUNG JAWAB SOSIAL
TERHADAP PENGEMBANGAN DESA WISATA BERKELANJUTAN DI JAWA
TIMUR: SEBUAH MODEL MEDIASI**

Erris Kusumawidjaya, Robiatul Adawiyah, Mohammad Syaltut Abduh,

Sundring Pantja Djati

Universitas Ciputra Surabaya, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti

ARTICLE INFO

Keywords:

tourism village; management policy; social responsibility; sustainable tourism development

Kata Kunci:

desa wisata; kebijakan pengelolaan; tanggung jawab sosial; pengembangan pariwisata berkelanjutan

Corresponding author:

Erris Kusumawidjaya

erris.kusumawidjaya@ciputra.ac.id

ABSTRACT. *The tourism industry is expected to recover after the Covid-19 pandemic. In Indonesia, tourism, which emphasizes community empowerment as an important feature of tourism villages, is expected to be an alternative driving force for tourism to show growth again. However, this certainly raises social and environmental challenges, which in turn draw attention to tourism patterns. Sustainable tourism promises the environmental protection and socio-cultural elements that are the main strengths of most tourist villages in Indonesia. Therefore, this study aims to understand the complex relationship between tourism village management policies and social responsibility that emphasizes sustainable tourism development. This study involved tourism village managers at the managerial level from 138 tourist villages in East Java Province, Indonesia. This study proposes that tourism village management policies and social responsibility have a positive and significant impact on the development of sustainable tourism villages. In addition, social responsibility is also able to play its role in mediating the relationship between tourism village management policies and sustainable tourism village development.*

ABSTRAK. Industri pariwisata diharapkan dapat mulai bangkit kembali pasca pandemi Covid-19. Di Indonesia, pariwisata yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat yang menjadi ciri utama dari desa wisata diharapkan dapat menjadi motor penggerak alternatif sehingga pariwisata bisa menunjukkan pertumbuhannya kembali. Namun, hal ini tentunya menimbulkan tantangan sosial dan lingkungan, yang pada gilirannya menarik perhatian pada pola pariwisata. Pariwisata berkelanjutan menjanjikan perlindungan lingkungan dan elemen sosial budaya yang menjadi kekuatan utama dari sebagian besar desa wisata di Indonesia. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk memahami hubungan yang kompleks antara kebijakan pengelolaan desa wisata dan tanggung jawab sosial yang menekankan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan. Studi ini melibatkan pengelola desa wisata pada level manajerial yang berasal dari 138 desa wisata yang ada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Studi ini mengusulkan bahwa kebijakan pengelolaan desa wisata dan tanggung jawab sosial memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap pengembangan desa wisata berkelanjutan. Selain itu, tanggung jawab sosial juga mampu memainkan perannya dalam memediasi hubungan antara kebijakan pengelolaan desa wisata dan pengembangan desa wisata berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Sebelum adanya pandemi Covid-19, pariwisata adalah salah satu sektor industri dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia (Indrianto et al., 2022; Kusumawidjaya et al., 2021; Mitasari et al., 2022). Namun, datangnya pandemi Covid-19 membuat pariwisata seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menjadi salah satu sektor industri yang paling terpukul (Malahayati et al., 2021). Bahkan Joo et al. (2021) memperkirakan bahwa pertumbuhan pariwisata secara global dalam dua hingga lima tahun ke depan tidak mungkin kembali seperti sebelum adanya pandemi Covid-19.

Studi ilmiah tentang dampak Covid-19 terhadap sektor industri pariwisata masih terus berkembang. Sebagian besar studi yang ada banyak berfokus pada faktor kekhawatiran wisatawan untuk berwisata (Zenker et al., 2021), risiko warga lokal terhadap kehadiran wisatawan (Joo et al., 2021; Vinerean et al., 2021), dan kecemasan karyawan di sektor hotel terhadap keselamatan dan kesehatan (Zhang et al., 2020, 2021),

Terlepas dari beragamnya penelitian yang berkembang tentang topik-topik tersebut, studi kali ini menemukan adanya kesenjangan penelitian. Kesenjangan penelitian yang dimaksud terkait dengan kajian terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainability tourism development*) akibat pandemi Covid-19 yang masih terbatas. Eslami et al. (2019) mendefinisikan pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagai upaya yang dilakukan untuk memenuhi permintaan atau keinginan wisatawan yang ada dan mengambil semua tindakan yang diperlukan dalam melindungi wilayah tempat wisata serta meningkatkan peluang untuk masa depan. Selain itu, Joo et al. (2021) menggambarkan pariwisata berkelanjutan sebagai respons sikap atau perilaku positif individu terhadap pariwisata.

Mengingat pandemi COVID-19 masih terus terjadi (Kusumawidjaya et al., 2021; Mitasari et al., 2022), maka penelitian empiris yang berfokus pada pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan masih relevan untuk terus dikembangkan. Mengantisipasi krisis global akibat pandemi Covid-19, León-Gómez et al. (2021) merekomendasikan penyelidikan yang mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan untuk mengatasi peluang peningkatan ekonomi di berbagai negara. Dengan demikian, mitigasi terhadap pariwisata berkelanjutan pada destinasi wisata juga menjadi sangat penting, karena menangani dampak pandemi Covid-19 adalah bagian dari penanganan keberlanjutan (Sharma et al., 2021).

Desa wisata sebagai alternatif destinasi wisata pasca pandemi Covid-19 (Septemuryantoro, 2021), sangat mengandalkan sumber daya budaya dan lingkungan dalam konteks pengembangan pariwisata berkelanjutan (Putra & Ariana, 2022). Oleh karena itu, diperlukan penekanan pada praktik tanggung jawab sosial untuk merangsang pariwisata serta melindungi degradasi sumber daya budaya dan alam (Chan et al., 2021; Gunawijaya & Pratiwi, 2018). Tanggung jawab sosial yang diimplementasikan oleh pengelola desa wisata memiliki arti penting bagi keberlanjutan pengembangan desa wisata itu sendiri (Amanda & Agfianto, 2021; Dwiatmadja et al., 2019). Dalam rangka mengoptimalkan manfaat positif dan meminimalkan dampak negatif operasional pengelolaan desa wisata, maka praktik Corporate Social Responsibility (CSR) dipercaya dapat menjadi solusi (Juniari & Mahyuni, 2020).

CSR dalam konteks pariwisata dapat didefinisikan sebagai panduan kebijakan bisnis dimana organisasi pariwisata mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam misi bisnis mereka sendiri, strategi dan operasi serta dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan mereka (Lund-Durlacher, 2013). CSR digambarkan sebagai konsep *multi-stakeholder* di mana pertimbangan kepentingan berbagai pemangku kepentingan dan dialog di antara mereka memainkan peran utama. Pemangku kepentingan dalam suatu organisasi adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi (Freeman, 2015). Pemangku kepentingan kunci untuk bisnis pariwisata salah satunya adalah masyarakat lokal (Swarbrooke, 2017), yang sekaligus bertindak sebagai pengelola wisata termasuk pula dalam konteks desa wisata. Pengelola desa wisata tidak hanya penerima manfaat, tetapi juga mitra untuk mewujudkan dan mengimplementasikan strategi dan proyek CSR (Lund-Durlacher, 2013).

Lebih lanjut, dalam konteks pengelolaan dan pengembangan desa wisata, peran *Destination Management Organization (DMO)* tidak dapat dihindari (Adeyinka-Ojo et al., 2014; Arbogast et al., 2017). Perencanaan dan manajemen sangat penting untuk merancang kebijakan yang tepat untuk pembangunan berkelanjutan (Kjosev & Eftimov, 2015). Di sisi lainnya, sumber daya lingkungan dan budaya merupakan faktor penting untuk pengembangan desa wisata (Putra & Ariana, 2022). Oleh karena itu, sumber daya tersebut harus dikelola dan dikembangkan secara bertanggung jawab melalui kebijakan pariwisata berkelanjutan dan manajemen destinasi (Cucculelli & Goffi, 2016; Goffi & Cucculelli, 2019).

Meskipun para peneliti telah banyak mengamati pengembangan pariwisata berkelanjutan, termasuk dalam konteks desa wisata, namun masih sedikit yang mengaitkan dengan tanggung jawab sosial destinasi (Hu et al., 2019; Su et al., 2020; Su, Huang, & Pearce, 2018), dan kebijakan dan manajemen pariwisata (Cucculelli & Goffi, 2016; Goffi & Cucculelli, 2019). Padahal kebijakan manajemen destinasi yang efisien dan tanggung jawab pemangku kepentingan memainkan peran penting dalam mengurangi masalah yang tak terhindarkan terkait dengan kegiatan pariwisata (Ho et al., 2017). Oleh karena itu, studi ini mencoba mengusulkan wawasan tentang kebijakan dan manajemen pariwisata dan tanggung jawab sosial destinasi sebagai determinan pengembangan pariwisata berkelanjutan khususnya dalam konteks desa wisata.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*) dan Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Mengingat kompleksitas dari topik pariwisata berkelanjutan, maka hipotesis yang dibangun dalam studi ini dilandasi oleh Teori Pertukaran Sosial. Teori Pertukaran Sosial merupakan kerangka kerja yang tepat untuk menjelaskan persepsi warga lokal tentang dampak pariwisata (Perdue et al., 1987). Warga lokal adalah orang yang tinggal di destinasi wisata dalam waktu yang lama dan mengalami perubahan hidup yang konsisten di bawah situasi terkait pariwisata, sehingga warga lokal merupakan pemangku kepentingan yang penting dari suatu destinasi (Gursoy et al.,

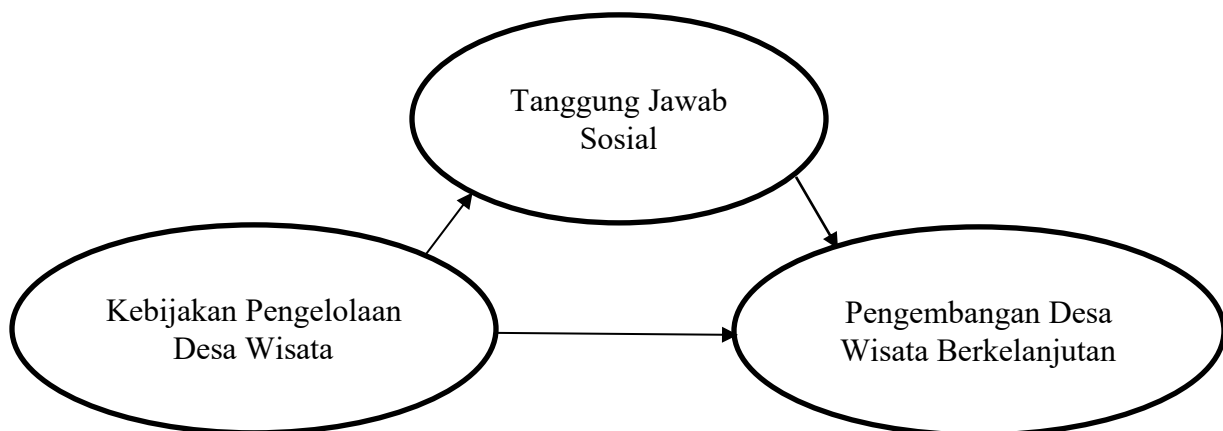
2019). Warga lokal yang dimaksud tentu saja termasuk warga lokal di desa wisata dan bahkan sebagian dari mereka berperan sebagai pengelola desa wisata itu sendiri.

Dalam studi ini, pengelola desa wisata sebagai salah satu pemangku kepentingan kunci yang menyadari keunggulan pariwisata berkelanjutan dapat berkontribusi secara aktif untuk pengembangannya. Selain itu, pengelola desa wisata dapat dengan sukarela terlibat dalam interaksi pertukaran untuk mengejar pariwisata berkelanjutan sebagai sesuatu yang bernilai (Eslami et al., 2019; Su et al., 2017). Oleh karena itu, Teori Pertukaran Sosial layak untuk digunakan dalam mengevaluasi kebijakan manajemen yang efektif terkait pengembangan pariwisata yang dipengaruhi oleh interaksi pertukaran.

Selain Teori Pertukaran Sosial, studi ini juga menggunakan Teori Pemangku Kepentingan yang dapat menjelaskan berbagai aspek pariwisata terkait dengan kebijakan, prosedur, budaya, pengembangan pariwisata, dan manajemen (Hsu et al., 2019). Banyak peneliti telah menekankan pentingnya teori ini dalam mempelajari manajemen pariwisata berkelanjutan (Byrd, 2007; Hörisch et al., 2014). Teori Pemangku Kepentingan banyak digunakan dalam penelitian pariwisata yang fokus pada identifikasi pemangku kepentingan dan peningkatan kolaborasi dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata (Byrd, 2007; Sautter & Leisen, 1999). Oleh karena itu, berlandaskan dalil yang termaktub dalam Teori Pemangku Kepentingan tersebut, maka studi ini berpandangan bahwa pengelola desa wisata sebagai pemangku kepentingan merupakan faktor kunci dari pariwisata berkelanjutan yang efektif. Partisipasi yang kuat dan solid dari pengelola desa wisata akan mempromosikan keberhasilan pariwisata berkelanjutan desa wisata.

Model dan Pengembangan Hipotesis Penelitian

Berlandaskan pada pendekatan kedua teori di atas, maka studi ini menyajikan model penelitian (Gambar 1) yang mencerminkan menunjukkan dampak langsung kebijakan pengelolaan desa wisata pada pengembangan desa wisata berkelanjutan dan menggambarkan efek tidak langsung melalui tanggung jawab sosial desa wisata.



Gambar 1. Model Penelitian

Kebijakan Pengelolaan Desa Wisata terhadap Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan

Konsep pengelolaan destinasi (*destination management*) diperkenalkan dalam literatur pariwisata selama 1980-an, dan lebih ditingkatkan pada akhir 1990-an (Morrison, 2012). Manajemen destinasi secara luas diakui sebagai faktor penting dalam menentukan daya saing destinasi (Cvelbar et al., 2016), termasuk pula dalam konteks desa wisata (Purnomo et al., 2019). Manajemen destinasi dapat didefinisikan sebagai sistem pengelolaan keterampilan dan kegiatan yang digunakan selama perencanaan dan pengorganisasian pariwisata secara terorganisasi di destinasi tertentu (Ryglová, 2008). Pengelolaan destinasi merupakan strategi pengembangan yang bereaksi terhadap kebutuhan pasar, menuju unit yang kuat, terarah secara strategis dan kompetitif (Foris et al., 2020). Destinasi yang kompetitif merupakan destinasi pariwisata berkelanjutan di mana nilai-nilai lingkungan dan sosial budaya dilindungi, di samping nilai-nilai ekonomi (Cucculelli & Goffi, 2016). Destinasi yang kompetitif dapat memberikan pengalaman pariwisata yang lebih baik dibandingkan dengan destinasi lainnya (Cvelbar et al., 2016).

Mengacu pada konsep pengelolaan destinasi tersebut, maka kebijakan pengelolaan desa wisata juga perlu menekankan pada optimalisasi pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan daya tarik destinasi. Kebijakan pengelolaan desa wisata secara tepat dapat menggambarkan atribut daya saing desa wisata dalam hal pengalaman, pengetahuan, dan informasi yang terkait dengan fokus dari para pemangku kepentingan. Dengan demikian, desa wisata yang kompetitif berkelanjutan tidak hanya melayani kebutuhan wisatawan, melindungi sumber daya lingkungan dan budaya lokal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat (Purnomo et al., 2019). Artinya kebijakan pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan merupakan komponen penting dari pembangunan dan revitalisasi desa yang terintegrasi dan berkelanjutan (Petkova et al., 2012). Pengembangan desa wisata membutuhkan pengelolaan yang cermat dan daya saing yang berkelanjutan. Dari perspektif ini, kebijakan pengelolaan pariwisata berkelanjutan bukanlah hasil akhir, tetapi kendaraan bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa adanya kebijakan pengelolaan yang tepat (Cucculelli & Goffi, 2016; Goffi & Cucculelli, 2019).

H₁: Kebijakan pengelolaan desa wisata akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan desa wisata berkelanjutan

Kebijakan Pengelolaan Desa Wisata terhadap Tanggung Jawab Sosial Desa Wisata

Secara umum, tujuan dari pembangunan desa wisata mengandung beberapa unsur seperti pengenalan, pendayagunaan, pelestarian dan peningkatan mutu dari suatu desa (Mahadewi, 2019; Mitasari et al., 2022). Sama seperti destinasi wisata lainnya, untuk pencapaian tujuan pembangunan desa wisata pasti memiliki konsekuensi baik yang bersifat positif maupun negatif. Sudah banyak literatur pariwisata yang menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata dapat memiliki konsekuensi negatif bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebagai contoh mulai timbulnya upaya komersialisasi kesenian dan budaya, polusi udara dan air, meningkatnya kejahatan dan konflik, dan lain sebagainya (Aryani et al., 2017; Harry, 2016; Rohani & Irdana, 2021). Oleh karena itu, upaya untuk mempertahankan dampak positif dan minimalisasi dampak negatif harus menjadi tujuan yang saling melengkapi. Upaya-upaya tersebut dapat dirumuskan

dalam sebuah rancangan dan penerapan kebijakan pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan. Kebijakan pengelolaan tersebut nantinya digunakan sebagai dasar dan *roadmap* untuk mengelola dan mengendalikan aktivitas pariwisata di desa wisata (Cucculelli & Goffi, 2016; Goffi & Cucculelli, 2019).

Mengacu pada pentingnya kebijakan pengelolaan tersebut, maka selanjutnya diharapkan tanggung jawab sosial akan timbul. Tanggung jawab sosial ini kemungkinan dapat melindungi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mengamankan kepentingan dan hak para pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial menyiratkan bahwa keputusan harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika, dan hasilnya harus di atas tingkat kinerja yang ditargetkan sesuai dengan kriteria peraturan yang telah dirumuskan sebelumnya (Su et al., 2020). Oleh karena itu studi ini menghipotesiskan bahwa kebijakan pengelolaan desa wisata dapat memiliki pengaruh positif terhadap tanggung jawab sosial.

H₂: Kebijakan pengelolaan desa wisata akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tanggung jawab sosial desa wisata

Tanggung Jawab Sosial Desa Wisata terhadap Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan

Perilaku organisasi yang bertanggung jawab secara sosial memainkan peran penting dalam mencapai pengembangan desa wisata yang berkelanjutan (Su & Swanson, 2017). dan dalam hal melindungi sumber daya alam, budaya, lingkungan, dan ekonomi masyarakat lokal (Su, Huang, & Pearce, 2018). Masyarakat lokal destinasi wisata menganggap dampak pariwisata sebagai akumulasi dari aktivitas yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan di lokasi tersebut termasuk orang-orang yang ditunjuk sebagai pengelolanya. Tujuan dari tanggung jawab sosial desa wisata mencakup kegiatan pemangku kepentingan yang melindungi dan meningkatkan kepentingan sosial dan lingkungan di samping kepentingan ekonomi organisasi atau individu (Su & Swanson, 2017). Oleh karena itu, pengembangan desa wisata berkelanjutan semestinya dapat memfasilitasi perlindungan sumber daya alam dan budaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Amanda & Agfianto, 2021; Goffi & Cucculelli, 2019).

Tanggung jawab sosial desa wisata boleh diasumsikan sebagai perluasan konsep CSR dalam konteks pariwisata yang fokus pada dimensi lingkungan, ekonomi, sosial para pemangku kepentingan, dan bersifat sukarela. Tanggung jawab sosial desa wisata merupakan ideologi kolektif dan upaya pemangku kepentingan yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pariwisata yang bertanggung jawab secara sosial (Su, Huang, & Huang, 2018). Oleh karena itu, tanggung jawab sosial berkaitan dengan kegiatan pariwisata di desa wisata yang diharapkan dapat mengurangi ketidakseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Su, Huang, & Pearce, 2018).

H₃: Tanggung jawab sosial desa wisata akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan desa wisata berkelanjutan

Peran Tanggung Jawab Sosial Desa Wisata sebagai Jembatan Penghubung antara Kebijakan Pengelolaan Desa Wisata dan Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan

Rumusan kebijakan pengelolaan destinasi wisata telah memprakarsai praktik tanggung jawab sosial yang dapat meningkatkan daya saing destinasi dan mendorong pembangunan destinasi pariwisata yang berkelanjutan (Sheldon & Park, 2011; Su, Huang, & Pearce, 2018). Pada umumnya, pengelola desa wisata selalu berupaya untuk mendesain kegiatan pariwisata sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan (Sheldon & Park, 2011). Pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan akan menciptakan keseimbangan antara pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi (Su, Huang, & Pearce, 2018).

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa pembangunan destinasi wisata, termasuk desa wisata, sedikit banyak memiliki dampak negatif pada sosial budaya dan lingkungan (Aryani et al., 2017; Harry, 2016; Rohani & Irdana, 2021). Dengan demikian, penerapan kebijakan pengelolaan yang berkelanjutan sangat diperlukan bukan hanya untuk menghapus dampak negatif tersebut, tetapi juga untuk membantu keberlanjutan pariwisata dalam jangka panjang (Lenzen et al., 2018). Praktik tanggung jawab sosial dapat digunakan sebagai strategi yang menjembatani peningkatan keberlanjutan, karena mewajibkan pengelola desa wisata untuk bekerja bagi kepentingan komunitas dan masyarakat secara keseluruhan (Su & Swanson, 2017). Su et al. (2017) juga menyoroti peran kunci pengembangan destinasi yang didorong oleh kebijakan pengelolaan yang baik dan mengarah pada pengembangan berkelanjutan.

H4: Tanggung jawab sosial desa wisata akan memediasi hubungan antara Kebijakan pengelolaan desa wisata dan pengembangan desa wisata berkelanjutan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di provinsi paling timur pulau Jawa yaitu Jawa Timur yang memiliki banyak desa wisata (Asidewi, 2018). Lokus penelitian yang sangat menarik dan cocok untuk mengamati kompleksitas pertumbuhan dan keberlanjutan pariwisata. Selanjutnya, populasi penelitian studi ini adalah para pengelola desa wisata khususnya pada level manajerial. Pemilihan pengelola desa wisata pada level manajerial dilandasi oleh pemikiran bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijakan pariwisata, tanggung jawab sosial, dan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Enright & Newton, 2004).

Berdasarkan data Asidewi (2018), jumlah desa wisata di Jawa Timur berjumlah 138 desa wisata yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten maupun kotamadya. Studi ini memutuskan untuk melibatkan masing-masing perwakilan pengelola dari seluruh desa wisata tersebut sebagai sampel penelitian sehingga pendekatan sampling jenuh melalui sensus yang digunakan sebagai teknik penentuan sampel. Peneliti menyebarkan kuesioner secara luring ataupun daring. Secara luring, peneliti mengunjungi kantor pengelola desa wisata. Sedangkan secara daring, peneliti mengirimkan email ataupun platform sosial media yang berisi permohonan pengisian data kuesioner yang telah dibuat dalam bentuk *google form*. Mengingat cakupan wilayah sebaran desa wisata yang sangat luas, maka pengumpulan data penelitian memerlukan waktu yang cukup panjang yaitu selama enam bulan (Januari – Juni 2022).

Pengukuran (*Measures*)

Seluruh konstruksi yang digunakan dalam kuesioner diadaptasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kuesioner didasarkan pada skala Likert lima poin dari sangat tidak setuju (1) sampai sangat setuju (5). Konstruk kebijakan pengelolaan desa wisata diukur dengan tujuh belas *item* dari penelitian Goffi & Cucculelli (2019). Ketujuh belas *item* tersebut terkait persepsi responden tentang komitmen sektor publik untuk mengurangi dampak negatif lingkungan dan sosial desa wisata, kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk pengembangan desa wisata, pengelolaan dan pengawasan desa wisata. Selanjutnya untuk konstruk tanggung jawab sosial diukur dengan lima *item* milik Su et al. (2018). Para responden akan diminta memberikan persepsinya tentang kepedulian sektor publik terhadap lingkungan, masyarakat, ekonomi, pemangku kepentingan, dan layanan sukarela. Yang terakhir, konstruk pengembangan desa wisata berkelanjutan diukur menggunakan enam *item* tentang perencanaan dan pengembangan desa wisata untuk mempertahankan standar ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keenam *item* tersebut diadopsi dari penelitian Eslami et al. (2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik demografi responden yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini mencakup jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan dan seberapa lama pengalamannya dalam pengelolaan desa wisata. Responden yang berpartisipasi adalah 78 wanita (56,5%), dan sisanya adalah 60 pria (43,5%) adalah perempuan. Kebanyakan responden berusia antara 46-55 tahun (35,5%), dan berturut-turut diikuti usia 36-45 tahun (30,4%), 25-35 tahun (18,8%), > 55 tahun (8,7%), dan < 25 tahun (6,6%). Berdasarkan jenjang pendidikan formal, sebanyak 103 responden (74,6%) berpendidikan SMA sederajat dan sisanya 35 responden (25,4%) bergelar sarjana S1. Yang terakhir, sebagian besar responden sudah memiliki pengalaman yang mencukupi dalam konteks pengelolaan desa wisata. 97 responden (70,3%) terlibat dalam pengelolaan desa wisata selama > 5 tahun, 22 responden (15,9%) memiliki pengalaman selama 3-5 tahun, dan 19 responden sisanya (13,8%) pengalamannya 1-2 tahun.

Selanjutnya, data penelitian yang terkumpul dari para responden diolah lebih lanjut untuk mendapatkan hasil perhitungan statistiknya. Hasil olah data statistik menggunakan GSCA yaitu suatu perangkat olah data yang dikembangkan oleh Hwang et al. (2017). Sama seperti perangkat olah data statistik lainnya, *output* yang dihasilkan oleh GSCA berupa *measurement model*, *structural model*, dan *overall model*.

Untuk pengukuran *fit of measurement model*, diketahui bahwa seluruh *item* untuk mengukur variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam kuesioner studi ini dapat dinyatakan valid dan reliabel. Dinyatakan valid karena nilai *estimate loading factor* untuk masing-masing *item* adalah > 0.7 dengan nilai titik kritis signifikan pada derajat kesalahan 5%. Selain itu, nilai *AVE (Average Variance Extracted)* sebagai cerminan *convergent validity* variabel laten juga > 0,6. Secara detail, hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Uji Validitas

| Variabel | Loading | Variabel | Loading |
|----------|---------|----------|---------|
|----------|---------|----------|---------|

| Kebijakan | AVE = 0.744 | Tanggung Jawab Sosial | AVE = 0.779 |
|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Kelola1 | 0.885 | TJS1 | 0.842 |
| Kelola2 | 0.861 | TJS2 | 0.833 |
| Kelola3 | 0.833 | TJS3 | 0.885 |
| Kelola5 | 0.837 | TJS4 | 0.842 |
| Kelola5 | 0.811 | TJS5 | 0.836 |
| Kelola6 | 0.822 | Pengembangan Berkelanjutan | AVE = 0.801 |
| Kelola7 | 0.863 | PB1 | 0.812 |
| Kelola8 | 0.861 | PB2 | 0.881 |
| Kelola9 | 0.817 | PB3 | 0.843 |
| Kelola10 | 0.881 | PB4 | 0.802 |
| Kelola11 | 0.843 | PB5 | 0.808 |
| Kelola12 | 0.897 | PB6 | 0.813 |
| Kelola13 | 0.883 | | |
| Kelola14 | 0.829 | | |
| Kelola15 | 0.808 | | |
| Kelola16 | 0.822 | | |
| Kelola17 | 0.891 | | |

Pada variabel kebijakan pengelolaan, item Kelola12 yaitu “Efektivitas struktur manajemen desa wisata” memiliki nilai estimate of loading tertinggi sebesar 0,897. Artinya *item* tersebut paling mampu menjelaskan dan mewakili variabel Kebijakan Pengelolaan sehingga penting untuk dipertahankan. Untuk variabel tanggung jawab sosial, nilai estimate of loading tertinggi ada pada item TJS3 yaitu “Pengelola desa wisata memperlakukan pemangku kepentingan lainnya dengan baik”. yaitu sebesar 0,885 sehingga paling mampu menjelaskan variabel tanggung jawab sosial dan penting untuk dipertahankan. Selanjutnya item PB2 pada variabel pengembangan berkelanjutan memiliki estimate of loading tertinggi yaitu sebesar 0,882 sehingga layak untuk dipertahankan. Item tersebut yaitu “Rencana pengembangan desa wisata mempertahankan nilai-nilai tradisi sosial dan budaya lokal”.

Setelah nilai validitas sudah memenuhi syarat, maka selanjutnya adalah memastikan nilai reliabilitas juga sudah terpenuhi. *Cronbach's Alpha* dan *Dillon-Goldstein's Rho* merupakan cerminan dari nilai *composite reliability*. Pada Tabel 2, tampak bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dan *Dillon-Goldstein's Rho* seluruhnya > 0,6 sehingga seluruh *item* dinyatakan reliabel

Tabel 2. Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach's alpha | Dillon-Goldstein's rho |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Kebijakan Pengelolaan | 0.819 | 0.835 |
| Tanggung Jawab Sosial | 0.834 | 0.849 |
| Pengembangan Berkelanjutan | 0.807 | 0.826 |

Selanjutnya pada Tabel 3 disajikan hasil uji *model fit* yang mencakup nilai *FIT*, *AFIT* (Adjusted FIT), *GFI* (*Goodness-of-Fit Index*), dan *SRMR* (*Standardized Root Mean Square*

Residual). *FIT* bernilai 0,667 diinterpretasikan bahwa model sudah cukup baik dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Untuk mengukur model yang lebih kompleks, maka lebih baik melihat nilai *AFIT* dalam menginterpretasikan ketepatan model dan sebagai dasar dalam melakukan perbandingan model. *AFIT* bernilai 0,654 memiliki pengertian bahwa keragaman variabel kebijakan pengelolaan, tanggung jawab sosial dan pengembangan berkelanjutan adalah sebesar 65.4%, sedangkan sisanya sebesar 34.6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya adalah melihat nilai *GFI* yang menunjukkan tingkat relevansi antara fakta yang diteliti dan teori yang digunakan dalam penelitian. Model konseptual dinyatakan dapat menjelaskan tingkat relevansi yang kuat jika nilai *GFI* > 90%. Nilai *GFI* bernilai 0,989 atau 98,9% yang berarti model dapat diterima dan menunjukkan relevansi yang kuat antara teori dan fenomena penelitian. Terakhir, nilai *SRMR* sebesar 0,061 menunjukkan bahwa model yang dikembangkan dalam studi ini sudah baik.

Tabel 3. Uji Model Fit

| <i>Fit Model</i> | | | |
|------------------|-------|-------------|-------|
| <i>FIT</i> | 0.667 | <i>GFI</i> | 0.989 |
| <i>AFIT</i> | 0.654 | <i>SRMR</i> | 0.061 |

Untuk membuktikan keseluruhan hipotesis penelitian yang dikembangkan dalam studi ini dapat diterima atau tidak, pada Tabel 4 disajikan data hasil nilai *path coefficient* (koefisien jalur) yang menunjukkan hubungan dan pengaruh antar variabel laten. Perhitungan nilai *CR* (*critical ratio*) didapatkan dari nilai *estimate* dibagi dengan *SE* (*standard error*). Seluruh nilai *CR* bernilai > 1,96 sehingga tidak ada hipotesis yang ditolak khususnya untuk hipotesis pertama, kedua dan ketiga.

Table 4. Estimates of Path Coefficient

| Hipotesis | <i>Estimate</i> | <i>SE</i> | <i>CR</i> | Keterangan |
|---|-----------------|-----------|-----------|------------|
| H ₁ : Kebijakan Pengelolaan → Pengembangan Berkelanjutan | 0.448 | 0.072 | 6.222 | Diterima |
| H ₂ : Kebijakan Pengelolaan → Tanggung Jawab Sosial | 0.338 | 0.097 | 3.485 | Diterima |
| H ₃ : Tanggung Jawab Sosial → Pengembangan Berkelanjutan | 0.494 | 0.062 | 7.977 | Diterima |

Untuk mengetahui hasil pembuktian hipotesis keempat dimana tanggung jawab sosial diposisikan sebagai *intervening variable* antara kebijakan pengelolaan dan pengembangan berkelanjutan, studi ini menggunakan metode *Sobel Test* yang hasilnya dapat dilihat pada Gambar 2. Perhitungan *Sobel Test* menunjukkan nilai *test statistic* > 1,96 yaitu sebesar 3,192 dan *p-value*

$< 0,05$ yaitu sebesar 0.001. Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial mampu menunjukkan perannya sebagai mediasi antara kebijakan pengelolaan dan pengembangan berkelanjutan.

| Input: | | Test statistic: | Std. Error: | p-value: |
|--------|-------|--------------------------|-------------|------------|
| a | 0.338 | Sobel test: 3.19258204 | 0.05229999 | 0.00141007 |
| b | 0.494 | Aroian test: 3.17168164 | 0.05264463 | 0.00151559 |
| s_a | 0.097 | Goodman test: 3.21390115 | 0.05195306 | 0.00130945 |
| s_b | 0.062 | Reset all | Calculate | |

Gambar 2. Sobel Test Result

Hipotesis pertama studi ini yaitu kebijakan pengelolaan desa wisata diduga dapat mempengaruhi pengembangan desa wisata berkelanjutan ternyata dapat diterima. Artinya kebijakan pengelolaan desa wisata berperan sangat penting untuk pengembangan berkelanjutan dari desa wisata (Cucculelli & Goffi, 2016; Goffi & Cucculelli, 2019; Petkova et al., 2012; Purnomo et al., 2019). Kebijakan pengelolaan desa wisata yang efektif yang telah dirumuskan oleh pihak pengelola desa wisata ternyata mampu menstimulasi dorongan pertukaran sumber daya antar pemangku kepentingan secara adil dan bertanggung jawab sehingga berkontribusi pada pengembangan desa wisata secara berkelanjutan. Dalam situasi semacam ini, pengembangan desa wisata berkelanjutan berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, meminimalkan dampak lingkungan dan sosial budaya. Oleh karena itu, studi ini berpandangan bahwa kebijakan pengelolaan yang baik terkait perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi dan pemantauan pariwisata berkelanjutan pada akhirnya berkontribusi secara positif di antara para pemangku kepentingan terlebih dalam hal peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan desa wisata berkelanjutan.

Selanjutnya hipotesis kedua studi ini juga diterima dimana kebijakan pengelolaan desa wisata berpengaruh secara signifikan terhadap tanggung jawab sosial. Hasil temuan studi ini mendukung hasil-hasil temuan dari penelitian sebelumnya bahwa manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal dan minimalisasi dampak negatif lingkungan dan sosial budaya harus menjadi tujuan yang saling melengkapi, dan sangat penting untuk merancang dan menerapkan kebijakan pariwisata berkelanjutan untuk mengelola dan mengontrol aktivitas pariwisata di desa wisata (Cucculelli & Goffi, 2016; Goffi & Cucculelli, 2019; Purnomo et al., 2019). Dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, *stakeholder theory* memperkirakan destinasi akan lebih efektif, berkelanjutan, dan dapat dikelola dengan baik (Freeman, 2015; Freeman et al., 2004). Dalil tersebut tentunya juga berlaku bagi desa wisata sebagai sebuah destinasi. Kebijakan pengelolaan desa wisata harus mampu menjalin komunikasi yang efektif dan berkesinambungan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan lainnya seperti masyarakat lokal, para wisatawan, pemerintah setempat dan lainnya. Tujuannya untuk menghubungkan dan mengoordinasikan beragam kepentingan pemangku kepentingan bagi pengembangan citra desa wisata yang berkualitas dan dapat dikenal lebih luas, sehingga keunggulan bersaing dalam jangka panjang dapat tercapai.

Temuan studi ini juga mengonfirmasi bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tanggung jawab sosial dan pengembangan desa wisata berkelanjutan, sehingga hipotesis ketiga diterima pula. Temuan ini juga selaras dengan temuan penelitian-penelitian sebelumnya (Amanda & Agfianto, 2021; Goffi & Cucculelli, 2019; Su et al., 2017; Su & Swanson, 2017), yang menerangkan bahwa praktik tanggung jawab sosial mempromosikan dukungan terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan. Menilik dari perspektif *Social Exchange Theory*, maka studi ini juga berpandangan bahwa dukungan terhadap pengembangan desa wisata berkelanjutan merupakan interaksi pertukaran dari para pemangku kepentingan terkait untuk mencari sesuatu yang bernilai (Eslami et al., 2019).

Terakhir, terkait dengan hipotesis keempat yang menyoroti peran tanggung jawab sosial sebagai mediator, maka studi ini menemukan bahwa tanggung jawab sosial juga mampu memainkan perannya sebagai jembatan antara kebijakan pengelolaan dan pengembangan desa wisata berkelanjutan, meskipun sifatnya memediasi secara parsial. Artinya kebijakan pengelolaan secara positif terkait dengan tanggung jawab sosial, yang selanjutnya meningkatkan pengembangan desa wisata berkelanjutan. Kebijakan pengelolaan yang berkelanjutan dapat mendorong pada pembangunan lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi dalam jangka panjang, sehingga dapat memberikan pengalaman pariwisata yang lebih baik. Selanjutnya, praktik tanggung jawab sosial mengakselerasi kegiatan pariwisata komunal, hubungan masyarakat, inisiatif lingkungan, dan manajemen keberlanjutan (Inoue & Lee, 2011).

KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini semakin melengkapi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang tentunya berkontribusi secara nyata pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pariwisata desa mengingat masih terbatasnya kajian yang mengamati hubungan antara kebijakan pengelolaan, tanggung jawab sosial dan pengembangan pariwisata berkelanjutan dalam konteks desa wisata. Studi ini menggambarkan ketergantungan pengembangan desa wisata berkelanjutan pada peran kebijakan pengelolaan desa wisata yang efektif termasuk komitmen dari tanggung jawab sosialnya. Adanya pandemi Covid-19 di Indonesia, membuat adanya celah peluang yang terbuka lebar sekaligus tantangan untuk mempertimbangkan kembali masa depan desa wisata sebagai destinasi alternatif yang patut untuk dikembangkan lebih lanjut.

Seluruh hipotesis yang diusulkan oleh studi ini menunjukkan pengaruh yang signifikan. Pengembangan desa wisata yang berkelanjutan semestinya dipahami sebagai kompetensi tingkat atas yang melibatkan peran berbagai faktor yang berbeda seperti kebijakan pengelolaan yang efektif dan komitmen tanggung jawab sosial yang tinggi. Kebijakan pengelolaan dan tanggung jawab sosial bermaksud untuk mengurangi dampak buruk aktivitas pariwisata. Di sisi lainnya, kebijakan pengelolaan dan tanggung jawab sosial juga harus mampu memfasilitasi kesejahteraan masyarakat lokal, mempromosikan pendidikan keberlanjutan, dan melindungi lingkungan, memberikan pengalaman pariwisata yang lebih baik, dan mempromosikan pertukaran budaya. Tidak dipungkiri bahwa aktivitas pariwisata dapat berdampak buruk yang mempengaruhi keberlanjutan desa wisata. Oleh karena itu, perilaku yang dapat merusak kelestarian lingkungan dan tatanan sosial budaya perlu diatasi dengan kebijakan pengelolaan yang baik dan efektif untuk pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

Meskipun studi ini mampu memberikan kontribusi yang positif bagi dunia penelitian, namun studi ini juga menyadari adanya kelemahan sehingga perlu untuk dilakukan penelitian lanjutan di masa depan oleh para peneliti lainnya. Dalam studi ini, data yang digunakan untuk analisis empiris dikumpulkan dari pengelola desa wisata di Jawa Timur, sehingga temuan yang dihasilkan juga bersifat terbatas. Oleh karena itu, studi ini dapat direplikasi oleh para peneliti dalam lingkup geografis, sosial, dan budaya yang berbeda. Selain itu, studi ini didasarkan pada desain penelitian *cross-sectional*; sehingga kontribusi yang lebih signifikan untuk penelitian masa depan dapat berupa pengumpulan dan analisis data longitudinal dan mengadopsi pendekatan metode campuran yang dapat menghasilkan alternatif hasil yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Adeyinka-Ojo, S. F., Khoo-Lattimore, C., & Nair, V. (2014). A framework for Rural Tourism Destination Management and Marketing Organisations. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 144, 151–163. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.284>
- Amanda, T. E., & Agfianto, T. (2021). The Corporate Social Responsibility (CSR) model of PT Indana in Jodipan Tourism Village Kampung Warna Warni''. *Jurnal Pengembangan Kota*, 9(1), 26–35. <https://doi.org/10.14710/jpk.9.1.26-35>
- Arbogast, D., Deng, J., & Maumbe, K. (2017). DMOs and rural tourism: A stakeholder analysis the case of Tucker County, West Virginia. *Sustainability (Switzerland)*, 9(10). <https://doi.org/10.3390/su9101813>
- Aryani, S., Sunarti, S., & Darmawan, A. (2017). Analisis dampak pembangunan pariwisata pada aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat (Studi kasus pada Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta). *Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya*, 49(2), 142–146.
- Asidewi. (2018). *Persebaran Asosiasi Desa Wisata (ASIDEWI) Jawa Timur*. Asosiasi Desa Wisata (ASIDEWI). <https://asidewi.id/berita/persebaran-asosiasi-desa-wisata-asidewi-jawa-timur/>
- Byrd, E. T. (2007). Stakeholders in sustainable tourism development and their roles: Applying stakeholder theory to sustainable tourism development. *Tourism Review*, 62(2), 6–13. <https://doi.org/10.1108/16605370780000309>
- Chan, J. K. L., Marzuki, K. M., & Mohtar, T. M. (2021). Local community participation and responsible tourism practices in ecotourism destination: A case of Lower Kinabatangan, Sabah. *Sustainability (Switzerland)*, 13(23). <https://doi.org/10.3390/su132313302>
- Cucculelli, M., & Goffi, G. (2016). Does sustainability enhance tourism destination competitiveness? Evidence from Italian destinations of excellence. *Journal of Cleaner Production*, 111, 370–382. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.12.069>
- Cvelbar, L. K., Dwyer, L., Koman, M., & Mihalič, T. (2016). Drivers of destination competitiveness in tourism: A global investigation. *Journal of Travel Research*, 55(8), 1041–1050. <https://doi.org/10.1177/0047287515617299>
- Dwiatmadja, C., Astawa, I. P., & Sukawati, T. G. R. (2019). The views of the tourism village managers on the green event concept in Bali. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 21(1), 89–94. <https://doi.org/10.9744/jmk.21.1.89-94>
- Enright, M. J., & Newton, J. (2004). Tourism destination competitiveness: A quantitative approach. *Tourism Management*, 25(6), 777–788. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.06.008>
- Eslami, S., Khalifah, Z., Mardani, A., Streimikiene, D., & Han, H. (2019). Community attachment,

- tourism impacts, quality of life and residents' support for sustainable tourism development. *Journal of Travel and Tourism Marketing*, 36(9), 1061–1079. <https://doi.org/10.1080/10548408.2019.1689224>
- Foris, D., Florescu, A., Foris, T., & Barabas, S. (2020). Improving the management of tourist destinations: A new approach to strategic management at the dmo level by integrating lean techniques. *Sustainability (Switzerland)*, 12(23), 1–22. <https://doi.org/10.3390/su122310201>
- Freeman, R. E. (2015). Strategic management: A stakeholder approach. In *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139192675>
- Freeman, R. E., Wicks, A. C., & Parmar, B. (2004). Stakeholder theory and “the corporate objective revisited.” *Organization Science*, 15(3). <https://doi.org/10.1287/orsc.1040.0066>
- Goffi, G., & Cucculelli, M. (2019). Explaining tourism competitiveness in small and medium destinations: The Italian case. *Current Issues in Tourism*, 22(17), 2109–2139. <https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1421620>
- Gunawijaya, J., & Pratiwi, A. (2018). How local community could contribute to the tourism development in rural area? *KnE Social Sciences*, 3(11), 826. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.2809>
- Gursoy, D., Zhang, C., & Chi, O. H. (2019). Determinants of locals' heritage resource protection and conservation responsibility behaviors. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 31(6), 2339–2357. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-05-2018-0344>
- Harry, H. (2016). Dampak pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap ekonomi masyarakat lokal. *Jurnal Pariwisata*, 3(2), 105–117.
- Ho, J. A., Chia, K. W., Ng, S. I., & Ramachandran, S. (2017). Problems and stakeholder responsibilities in island tourism: The case of Tioman Island in Malaysia. *Journal of Hospitality and Tourism Research*, 41(4), 445–474. <https://doi.org/10.1177/1096348013515912>
- Hörisch, J., Freeman, R. E., & Schaltegger, S. (2014). Applying Stakeholder Theory in sustainability management: Links, similarities, dissimilarities, and a conceptual framework. *Organization and Environment*, 27(4), 328–346. <https://doi.org/10.1177/1086026614535786>
- Hsu, C. Y., Chen, M. Y., & Yang, S. C. (2019). Residents' attitudes toward support for island sustainable tourism. *Sustainability (Switzerland)*, 11(18). <https://doi.org/10.3390/su11185051>
- Hu, B., Tuou, Y., & Liu, J. (2019). How does destination social responsibility impact residents' pro-tourism behaviors? The mediating role of place attachment. *Sustainability*, 11(12), 3373. <https://doi.org/10.3390/su11123373>
- Hwang, H., Takane, Y., & Jung, K. (2017). Generalized structured component analysis with uniqueness terms for accommodating measurement error. *Frontiers in Psychology*, 8(DEC). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02137>
- Indrianto, A. T. L., Oktavio, A., & Nugroho, A. (2022). Pilgrimage tourism events in Indonesia: Examining the relationship of behavioral belief, motivation to comply, attitudes, subjective norms, and intention to partake. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 20(1), 54–65. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2022.020.01.06>
- Inoue, Y., & Lee, S. (2011). Effects of different dimensions of corporate social responsibility on corporate financial performance in tourism-related industries. *Tourism Management*, 32(4), 790–804. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.06.019>
- Joo, D., Xu, W., Lee, J., Lee, C. K., & Woosnam, K. M. (2021). Residents' perceived risk, emotional solidarity, and support for tourism amidst the COVID-19 pandemic. *Journal of Destination Marketing and Management*, 19. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2021.100553>

- Juniari, N. W., & Mahyuni, L. P. (2020). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mewujudkan Pariwisata berbasis masyarakat berkelanjutan. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 21. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v4i1.7449>
- Kjosev, S., & Eftimov, L. (2015). Sustainable development planning – The case of Macedonia. *MEST Journal*, 3(1), 185–194. <https://doi.org/10.12709/mest.03.03.01.20>
- Kusumawidjaya, E., Adityaji, R., & ... (2021). Popularitas wellness hotel dalam perspektif sikap dan minat konsumen sebagai tempat tujuan menginap pasca pandemi Covid-19. *Ultima Management: Jurnal Ilmu Manajemen*, 13(2), 338–351. <https://doi.org/https://doi.org/10.31937/manajemen.v13i2.2312>
- Lenzen, M., Sun, Y. Y., Faturay, F., Ting, Y. P., Geschke, A., & Malik, A. (2018). The carbon footprint of global tourism. *Nature Climate Change*, 8(6), 522–528. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0141-x>
- León-Gómez, A., Ruiz-Palomo, D., Fernández-Gámez, M. A., & García-Revilla, M. R. (2021). Sustainable tourism development and economic growth: Bibliometric review and analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 13(4), 1–20. <https://doi.org/10.3390/su13042270>
- Lund-Durlacher, D. (2013). Corporate Social Responsibility in tourism. In *Encyclopedia of Corporate Social Responsibility* (pp. 594–594). https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_745
- Hartawan, E., Liu, D., Handoko, M., Evan, G., & Widjojo, H. (2021). Pengaruh Iklan Di Media Sosial Instagram Terhadap Minat Beli Masyarakat Pada E-Commerce. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 8(1). doi:<https://doi.org/10.35794/jmbi.v8i1.33853>
- Mahadewi, N. M. E. (2019). Rural tourism development through tourist village destination in Badung Regency, Bali. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(11), 368–375.
- Malahayati, M., Masui, T., & Anggraeni, L. (2021). An assessment of the short-term impact of COVID-19 on economics and the environment: A case study of Indonesia. *Economia*, 22(3), 291–313. <https://doi.org/10.1016/j.econ.2021.12.003>
- Melisa, P., L. Mandey, S., & Hasan Jan, A. (2020). Analisis Pengaruh Promosi, Inovasi Produk Dan Citra Perusahaan Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Perceived Value (Studi Kasus Pada Milenial Yang Menggunakan Maskapai Garuda Indonesia). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 7(3). doi:<https://doi.org/10.35794/jmbi.v7i3.31515>
- Mitasari, R., Adityaji, R., Widyawati, C., Adrie Oktavio, Wijaya, V., & Nugroho, A. (2022). Pelatihan penerapan protokol cleanliness, health, safety, and environment sustainability di Desa Wisata Peniwen pada tatanan normal baru. *Selaparang ...*, 6(1), 448–455. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i1.7653>
- Morrison, A. (2012). Destination management and destination marketing: The platform for excellence in tourism destinations. *Tourism Tribune*, 28(1), 6–9. <http://www.lyxk.com.cn/fileup/PDF/2013-1-6.pdf>
- Perdue, R. R., Long, P. T., & Allen, L. (1987). Rural resident tourism perceptions and attitudes. *Annals of Tourism Research*, 14(3), 420–429. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(87\)90112-5](https://doi.org/10.1016/0160-7383(87)90112-5)
- Petkova, T. A., Koteski, C., Jakovlev, Z., & Mitrevska, E. (2012). Sustainability and competitiveness of tourism. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 44, 221–227. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.023>
- Purnomo, S., Rahayu, E. S., & Riani, A. L. (2019). Tourism village management based on information technology with destination management system. *Proceeding of ICOHETECH*,

- 229–233. <http://ojs.udb.ac.id/index.php/icohetech/article/view/809>
- Putra, A. M., & Ariana, I. N. J. (2022). Manfaat pengembangan desa wisata dari aspek alam, sosial budaya, spiritual, dan ekonomi di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Kepariwisata Dan Hospitalitas*, 5(2), 209. <https://doi.org/10.24843/jkh.2021.v05.i02.p13>
- Rohani, E. D., & Irdana, N. (2021). Dampak sosial budaya pariwisata: Studi kasus Desa Wisata Pulesari dan Desa Ekowisata Pancoh. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 128. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2021.v08.i01.p07>
- Ryglová, K. (2008). Destination management. *Agricultural Economics*, 54(9), 440–448. <https://doi.org/10.17221/2703-agricecon>
- Sautter, E. T., & Leisen, B. (1999). Managing stakeholders: A tourism planning model. *Annals of Tourism Research*, 26(2), 312–328. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(98\)00097-8](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(98)00097-8)
- Septemuryantoro, S. A. (2021). Potensi desa wisata sebagai alternatif destinasi wisata new normal. *Media Wisata*, 19(2), 186–197. <https://doi.org/10.36276/mws.v19i2.2>
- Sharma, G. D., Thomas, A., & Paul, J. (2021). Reviving tourism industry post-COVID-19: A resilience-based framework. *Tourism Management Perspectives*, 37. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100786>
- Sheldon, P. J., & Park, S. Y. (2011). An exploratory study of corporate social responsibility in the U.S. travel industry. *Journal of Travel Research*, 50(4), 392–407. <https://doi.org/10.1177/0047287510371230>
- Su, L., Huang, S. (Sam), & Huang, J. (2018). Effects of destination social responsibility and tourism impacts on residents' support for tourism and perceived quality of life. *Journal of Hospitality and Tourism Research*, 42(7), 1039–1057. <https://doi.org/10.1177/1096348016671395>
- Su, L., Huang, S. (Sam), & Pearce, J. (2018). How does destination social responsibility contribute to environmentally responsible behaviour? A destination resident perspective. *Journal of Business Research*, 86, 179–189. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.02.011>
- Su, L., & Swanson, S. R. (2017). The effect of destination social responsibility on tourist environmentally responsible behavior: Compared analysis of first-time and repeat tourists. *Tourism Management*, 60, 308–321. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.12.011>
- Su, L., Swanson, S. R., & He, X. (2020). A scale to measure residents perceptions of destination social responsibility. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(6), 873–897. <https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1708372>
- Su, L., Wang, L., Law, R., Chen, X., & Fong, D. (2017). Influences of destination social responsibility on the relationship quality with residents and destination economic performance. *Journal of Travel and Tourism Marketing*, 34(4), 488–502. <https://doi.org/10.1080/10548408.2016.1193101>
- Swarbrooke, J. (2017). Towards a new approach to sustainable tourism management. In *Sustainable tourism management*. (pp. 41–44). <https://doi.org/10.1079/9780851993140.0041>
- Vinerean, S., Opreana, A., Tileagă, C., & Popșa, R. E. (2021). The impact of covid-19 pandemic on residents' support for sustainable tourism development. *Sustainability (Switzerland)*, 13(22). <https://doi.org/10.3390/su132212541>
- Zenker, S., Braun, E., & Gyimóthy, S. (2021). Too afraid to travel? Development of a Pandemic (COVID-19) Anxiety Travel Scale (PATs). *Tourism Management*, 84. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104286>
- Zhang, J., Xie, C., & Morrison, A. M. (2021). The effect of corporate social responsibility on hotel employee safety behavior during COVID-19: The moderation of belief restoration and negative emotions. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 46, 233–243.

<https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.12.011>

Zhang, J., Xie, C., Wang, J., Morrison, A. M., & Coca-Stefaniak, J. A. (2020). Responding to a major global crisis: The effects of hotel safety leadership on employee safety behavior during COVID-19. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 32(11), 3365–3389. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-04-2020-0335>